



The Ambiguity of NU's Digital Preaching in Identity Politics

Ambiguitas Dakwah Digital NU dalam Politik Identitas

Sitti Ansorih*, Khusnul Khotimah

UIN Profesor Kiai Safuddin Zuhri, Purwokerto, Indonesia

*Penulis Korespondensi. Email: sittiansorih@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the ambiguity of Nahdlatul Ulama (NU) digital da'wah in facing religious populism and identity politics with a focus on NU's online media platform. This study was conducted because of the increasing strategic role of digital media in shaping religious and political public opinion in Indonesia, as well as NU's position as a representation of moderate Islam. The research approach used is qualitative with Van Dijk's critical discourse analysis method. This method is used to analyze the content of articles in NU Online related to moderation, religious identity, and populism. The results show that there is ambiguity in NU Online articles. Three main ambiguities are indicated by the results of the study: the narrative of moderation and exclusive nationalism, the paradox of rejecting identity politics, and the deradicalization debate that tends to define moderate Islam in a limited way. The results show that NU Online is not only a da'wah medium but also an arena for symbolic battles to maintain NU's hegemonic position in the landscape of identity politics in Indonesia. This study enhances our understanding of how mainstream religious media create ideologically laden da'wah narratives. In addition, this study shows how important it is to think critically when responding to digital da'wah messages in the era of religious populism.

KEYWORDS digital da'wah; identity politics; NU Online; religious populism

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ambiguitas dakwah digital Nahdlatul Ulama (NU) dalam menghadapi populisme agama dan politik identitas dengan fokus pada platform media online NU. Penelitian ini dilakukan karena peran strategis media digital yang meningkat dalam membentuk opini publik keagamaan dan politik di Indonesia, serta posisi NU sebagai representasi Islam moderat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis wacana kritis Van Dijk. Metode ini digunakan untuk menganalisis konten artikel di NU Online yang berkaitan dengan moderasi, identitas keagamaan, dan populisme. Hasil menunjukkan bahwa, adanya ambiguitas pada artikel NU Online. Tiga ambiguitas utama ditunjukkan oleh hasil penelitian: narasi moderasi dan nasionalisme yang eksklusif, paradoks penolakan politik identitas, dan debat deradikalisasi yang cenderung mendefinisikan Islam moderat secara terbatas. Hasilnya menunjukkan bahwa NU Online tidak hanya menjadi media dakwah tetapi juga arena pertarungan simbolik untuk mempertahankan posisi hegemonik NU dalam lanskap politik identitas di Indonesia. Penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana media keagamaan arus utama membuat narasi dakwah yang sarat ideologis. Selain itu, penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya berpikir kritis saat menanggapi pesan dakwah digital di era populisme agama.

KATA KUNCI dakwah digital; politik identitas; NU Online; populisme agama

Pendahuluan

Politik identitas dan populisme agama telah menjadi topik utama dalam politik Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Politik identitas membentuk batas sosial melalui penguatan identitas kelompok, sedangkan populisme agama cenderung menggunakan simbol dan sentimen keagamaan untuk mendapatkan dukungan politik. Media, terutama media keagamaan, berfungsi sebagai sarana utama untuk menyebarkan dakwah dan memperkuat ideologi kelompok, dan mereka memainkan peran penting sebagai arena konstruksi makna dalam konteks ini. Nahdlatul Ulama (NU) berperan penting dalam menyebarkan narasi keislaman moderat di Indonesia, terutama melalui media onlinenya, NU Online.

NU Online adalah website resmi suara Nahdlatul Ulama yang menyajikan informasi keislaman dan mempromosikan prinsip Islam yang moderat, toleran, dan inklusif. Namun, di tengah polarisasi politik yang semakin meningkat, muncul pertanyaan tentang bagaimana media dapat tetap independen sebagai media dakwah. Ada bukti bahwa media ini secara tidak langsung berpartisipasi dalam wacana politik identitas. Ini menimbulkan keraguan: apakah media NU hanya melakukan tugas dakwah atau telah terlibat dalam proses politik populis?

Penelitian sebelumnya telah menekankan peran media keagamaan dalam memperkuat identitas kelompok. Misalnya, (Kholili, Izudin, and Hakim 2024) dan (Lim 2017) menunjukkan bahwa, tergantung pada konteks sosial-politik yang melingkupinya, media digital keagamaan dapat menjadi alat yang berguna untuk menyebarkan narasi yang eksklusif atau inklusif. Identitas keagamaan digunakan sebagai simbol pembeda dan alat legitimasi politik, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Roy 2004) dan (Mudde and Kaltwasser 2017). Studi ini juga menunjukkan bahwa populisme agama berkembang pesat. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus mempelajari ambiguitas media keagamaan arus utama seperti NU Online dalam membingkai dakwah dan identitas politik.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana ambiguitas muncul dan diwakili dalam konten dakwah digital NU? Studi ini tidak hanya meningkatkan penelitian tentang hubungan antara media dan politik identitas, tetapi juga memberikan teori tentang bagaimana media keagamaan berperan dalam dakwah dan dinamika kekuasaan simbolik di ruang publik digital.

Kerangka Teori

Teun A. van Dijk mendefinisikan Analisis Wacana Kritis (AWK) sebagai praktik sosial yang tidak netral yang dipenuhi dengan ideologi dan hubungan kuasa (Van Dijk 1993). Van Dijk membagi analisis teks menjadi tiga tingkat utama dalam kerangkanya: (1). Struktur Makro melihat tema besar atau ide pokok teks, yaitu masalah utama yang dibahas; (2). Struktur Super melihat organisasi teks,

termasuk urutan, bagian, dan fokus informasi dan (3). Struktur Mikro melihat detail bahasa, seperti penggunaan kata, kalimat, metafora dan strategi retorik.

Untuk mengungkap makna tersembunyi dan kepentingan sosial atau ideologis yang terkandung dalam teks, ketiga level ini saling terkait. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat membedah bagaimana teks dakwah digital membangun atau menyamakan makna, termasuk kemungkinan ambiguitas yang muncul.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan teori yang berfungsi sebagai fondasi konseptual untuk memahami fenomena ambiguitas media keagamaan di era politik identitas dan populisme. Pertama, teori populisme agama oleh (Mudde and Kaltwasser 2017) menggambarkan populisme sebagai strategi politik yang menggunakan simbol keagamaan untuk membuat narasi "kami versus mereka", yaitu rakyat versus elit atau kelompok Islam moderat versus kelompok ekstrem. Metode ini membantu menjelaskan bagaimana simbol Islam digunakan untuk membangun kekuatan politik yang didasarkan pada identitas.

(Roy 2004) membahas teori politik identitas dengan mengatakan bahwa agama telah berubah menjadi alat untuk identitas sosial dan politik di era globalisasi. Roy menjelaskan bagaimana Islam terbagi menjadi berbagai identitas yang dibentuk oleh media, konteks politik, dan lokalitas. Ketiga, teori representasi (Hall 1997) mengatakan bahwa media bukan hanya merefleksikan realitas tetapi juga aktif membentuk realitas sosial melalui bahasa dan simbol. Dalam studi ini, media online NU dianggap sebagai agen representasi yang membingkai makna tertentu dari keislaman, termasuk dalam menangani kelompok lain yang dianggap menyimpang atau ekstrem.

Pendekatan keempat adalah pendekatan ambiguitas dalam komunikasi keagamaan (Asad 2003; Kholili et al. 2024), yang membahas bagaimana media keagamaan sering mengaburkan batas antara dakwah murni dan kepentingan politik dan ideologis. Kholili et al. 2024 menunjukkan bahwa peraturan penyiaran saat ini tidak cukup untuk menangani perkembangan dakwah digital, yang semakin didominasi oleh konten konservatif. Akibatnya, media keagamaan terlibat dalam dinamika sosial-politik denial.

Penelitian ini menganalisis bagaimana NU Online membentuk narasi dakwah yang mendukung moderasi sambil berpartisipasi dalam wacana politik identitas. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan teori-teori di atas. Untuk memahami bagaimana media dakwah direpresentasikan dalam era populisme agama, dengan menggunakan pendekatan teori konseptual ini.

Metode Penelitian

Untuk memahami fenomena ambiguitas dakwah digital yang dilakukan oleh media online NU dalam konteks populisme dan politik identitas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Masalah yang diteliti adalah bagaimana media keagamaan dalam hal ini NU Online merepresentasikan dakwah Islam moderat sekaligus menyampaikan narasi yang berhubungan dengan dinamika politik identitas.

Konten dakwah yang dimuat di NU Online dari tahun 2022 hingga 2024 adalah subjek penelitian ini. Menganalisis 30 artikel dengan rincian: dua belas artikel yang membahas moderasi beragama dan nasionalisme, sembilan artikel yang membahas politik identitas, dan sembilan artikel yang membahas deradikalisasi. Pemilihan artikel didasarkan pada relevansi narasi dengan masalah kebangsaan, toleransi, ideologi Islam moderat, dan respons terhadap dinamika sosial-politik nasional.

Fokus penelitian adalah artikel-artikel yang berkaitan dengan kebangsaan, toleransi, ideologi Islam moderat, dan cara menanggapi masalah sosial-politik nasional. Faktor penting dalam politik nasional, seperti pemilu, dan perkembangan sosial setelah pandemi, menentukan pemilihan saat ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan analisis isi dari artikel-artikel yang tersedia di laman resmi <https://nu.or.id>. Topik-topik yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan wacana dakwah, politik identitas, dan populisme.

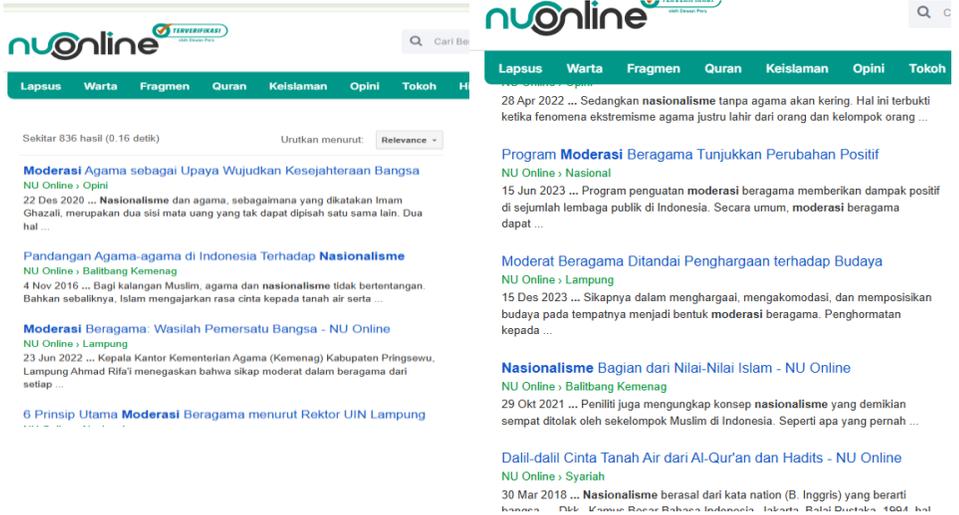
Analisis data dilakukan menggunakan analisis wacana kritis Van Dijk model kognisi sosial, yang menganggap teks sebagai praktik produksi sosial. Pandangan terhadap teks mengacu pada representasi yang digambarkan oleh keadaan sosial masyarakat saat teks ditulis. Sebagai bagian dari jembatan kognisi sosial, Van Dijk menghubungkan komponen utama, yaitu struktur sosial, dengan aspek wacana mikro (Van Dijk 2001)

Hasil Penelitian

Ada 30 artikel di rubrik Opini, Khazanah, dan Berita Nasional di portal NU Online dari Januari 2022 hingga April 2024 yang digunakan untuk analisis narasi populisme agama dalam konten dakwah digital. Tema seperti moderasi beragama, nasionalisme, politik identitas, dan deradikalisasi menjadi dasar pemilihan artikel. Pola-pola yang muncul dalam narasi, simbol, dan wacana artikel diidentifikasi melalui teknik analisis isi kualitatif. Menurut proses coding dan kategorisasi, tiga tema utama terkait populisme agama mendominasi cerita dakwah NU Online, yaitu: (1) Moderasi dan Nasionalisme; (2) Politik Identitas dan (3) Deradikalisasi.

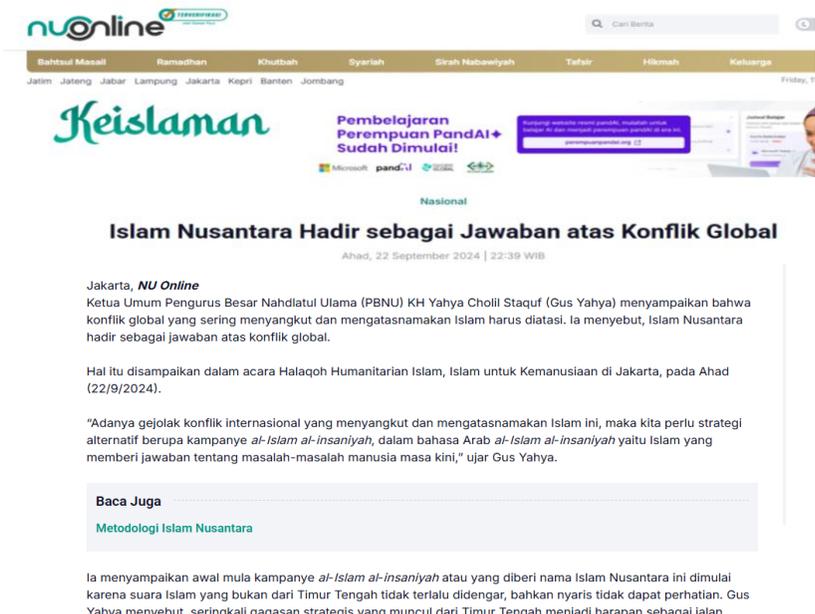
1. Ambiguitas Narasi Moderasi dan Nasionalisme

Hasil penelitian dengan melihat konten dakwah digital yang diposting oleh NU Online. Fokus utama adalah cerita Islam moderat dan representasi masalah sosial-politik yang berkaitan dengan identitas keagamaan. Dalam menyuarakan nilai-nilai seperti toleransi, nasionalisme, dan anti-ekstremisme, ditemukan pola-pola naratif yang konsisten. Berikut beberapa judul artikel yang mempersentasikan moderasi dan nasionalisme, hal ini menunjukkan loyalitas dan upaya NU Online dalam mengintegrasikan ajaran Islam moderat dengan nilai-nilai kebangsaan untuk memperkuat persatuan nasional.



Gambar 1 Laman NU Online
(sumber <https://nu.or.id>)

Hasil analisis konten dakwah di NU Online menunjukkan bahwa narasi moderasi beragama dan nasionalisme yang diusung ambigu. Secara umum, NU Online berfungsi sebagai media dakwah yang mendukung Islam moderat dan cinta tanah air. Contohnya adalah artikel seperti "Islam Nusantara Hadir sebagai Jawaban atas Konflik Global", yang menyatakan bahwa "Islam Nusantara merupakan model Islam yang ramah, toleran, dan kontekstual dengan budaya lokal, serta menjadi solusi untuk menekan konflik berbasis agama" (NU Online 2022a).



Gambar 2. Artikel NU Online 22 september 2004

Rubrik Opini dan Khazanah di situs tersebut juga membahas pentingnya mempertahankan ukhuwah, toleransi antar umat beragama, dan komitmen terhadap ideologi Pancasila dan NKRI. Sebagai contoh, disebutkan dalam artikel berjudul "Peran NU dalam Menangkal Radikalisme" bahwa

NU sebagai organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab menjaga keutuhan NKRI dan menangkal ideologi-ideologi yang berpotensi memecah belah bangsa"(NU Online 2021).

Artikel-artikel ini menguatkan citra Universitas Nahdlatul Ulama sebagai pelindung nilai-nilai kebangsaan dan pendukung moderasi beragama.



Gambar 3. Artikel NU Online 25 Maret 2015

Meskipun NU Online mendukung prinsip toleransi dan keberagaman, mereka juga menunjukkan kontradiksi atau ambiguitas dalam banyak artikel mereka. Mereka mengkritik kelompok Islam tertentu yang memiliki pandangan teologis dan ideologis yang berbeda, sementara mereka mendukung keterbukaan dan inklusi. Ada beberapa contoh artikel yang menunjukkan ambiguitas ini: Artikel: "Bahaya Gerakan Islam Transnasional bagi NKRI", dinyatakan:

Gerakan Islam transnasional tidak mengenal batas negara dan tidak mengindahkan budaya lokal, sehingga menjadi ancaman bagi eksistensi NKRI yang menjunjung tinggi Pancasila, kebhinekaan, dan toleransi." (NU Online, diakses 2025)

Dalam kutipan ini, ada perbedaan yang jelas antara "Islam Nusantara", yang digambarkan sebagai ramah dan nasionalis, dan "Islam transnasional", yang dianggap sebagai ancaman ideologis. Meskipun kisah ini bertujuan untuk

mempertahankan stabilitas nasional, metode ini juga menunjukkan eksklusivitas dalam mendefinisikan "Islam yang diterima" dan berpotensi menghapus jenis keberagaman lain yang tidak selaras dengan kerangka organisasi Muslim Universal.

Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa "Islam transnasional tidak mengenal batas negara dan berpotensi besar merusak sistem berbangsa yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa," yang mencerminkan bagaimana NU Online mengusung narasi moderasi beragama namun dalam kerangka ideologis Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Meskipun NU Online mendorong nilai toleransi dan kebhinekaan, mereka seringkali tidak memberikan ruang yang sama kepada kelompok Islam lain, seperti Wahabi, Salafi, atau gerakan transnasional, yang dianggap sebagai radikal, intoleran, dan bertentangan dengan semangat kebangsaan. Namun, moderasi yang ditawarkan lebih merupakan strategi ideologis untuk mempertahankan dominasi pemahaman keagamaan khas NU.

2. Ambiguitas dalam Penolakan Politik Identitas

Secara konsisten, NU Online menyatakan penolakan terhadap politik identitas. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, menyatakan dalam artikel yang diterbitkan pada 19 Februari 2023, "PBNU Tegaskan NU Tolak Politik Identitas sebagai Senjata Galang Dukungan", bahwa NU menolak penggunaan identitas, termasuk identitas Islam dan NU itu sendiri, sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan (NU Online 2023c). Meskipun demikian, ambiguitas muncul ketika Partai Nasional Islam menolak politik identitas tetapi tetap mempertahankan identitasnya sebagai bagian dari berbagai aktivitas sosial dan politik. Ini menimbulkan keraguan tentang perbedaan antara mempertahankan identitas organisasi dan menolak politik identitas. [NU Online+5](#)
[NU Online+5](#)
[NU Online+5](#)

The screenshot shows a news article on the NU Online website. The article title is "PBNU Tegaskan NU Tolak Politik Identitas sebagai Senjata Galang Dukungan". The main text discusses the stance of PBNU regarding the use of identity as a political tool for garnering support. It mentions KH Yahya Cholil Staquf's statement that NU rejects the use of identity, including Islamic identity and NU itself, as a political instrument to gain support. The article also notes that while some groups like the Partai Nasional Islam reject identity politics, they still maintain their identity as part of social and political activities, leading to ambiguity.

Warta Khutbah Sejarah Keislaman Tokoh Profil Opini PWNU Ngalogot Lainnya

PBNU Tegaskan NU Tolak Politik Identitas sebagai Senjata Galang Dukungan

mendesak untuk terus dikembangkan.

Hai itulah yang membuat NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya saat ini bersikeras menolak identitas-identitas digunakan sebagai senjata politik.

Baca Juga

[AI Islamu AI Insaniyah, Komitmen Islam Bangun Kesejahteraan Manusia](#)

"NU ngotot (bersikukuh) menolak politik identitas. NU menolak identitas-identitas digunakan sebagai senjata politik untuk menggalang dukungan. Tidak identitas Islam, tidak juga identitas NU itu sendiri," tegas Gus Yahya dalam Simposium Nasional Satu Abad NU di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (19/2/2023).

Penolakan terhadap praktik politik identitas itu, kata Gus Yahya, lantaran NU tidak mau masuk ke dalam suatu dinamika kompetisi politik yang hanya melalui didasarkan pada pembelaan identitas-identitas.

Baca Juga

[Nalar Trilogi Ukhawah dan Kesadaran Persaudaraan Sebangsa Kunci Kerukunan Umat Beragama](#)

<https://jabar.nu.or.id/nasional/al-islam-al-insaniyah-komitmen-islam-bangun-kesejahteraan-manusia-19x28>

3 PWNU Jabar dan Keuskupan Bandung Jaln Kerjasama Tanam Mangrove di Indramayu

4 Profil Nova Arianto, 'Suster Ngesot' yang Bawa Timnas U-17 Lolos ke Piala Dunia 2025

5 Timnas Indonesia Kalahkan Yaman dengan Skor Telak 4-1: Assalamualaikum Piala Dunia U-17 2025

6 Jejak Cinta di Bulan Syawal: Kisah Pernikahan Rasufullah dengan Siti Aisyah

Type here to search 06:15 11/04/2023

Warta	Khutbah	Sejarah	Keislaman	Tokoh	Profil	Opini	PI
Sebab dalam pandangan Gus Yahya, membela identitas akan cenderung mengarah pada kompetisi yang irasional atau tidak berdasar pada akal sehat.							
"Kalau NU lawan yang bukan NU maka itu tidak ada argumen rasional di sana. Kalau bukan NU, pokoknya nggak mau. Kalau nggak qunut, nggak mau. Mulai puasanya bareng apa enggak? Kalau nggak bareng nggak mau. Tidak ada argumentasi rasional," jelas Gus Yahya.							
Kemudian apabila tidak ada argumentasi yang rasional di dalam kompetisi maka tidak akan ada pendidikan politik. Dampaknya, bakal timbul demokrasi yang irasional.							
"Bahkan di sisi lain, ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap kiai yang memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.							
Untuk itu, Gus Yahya meminta kepada semua pihak untuk mampu mengelola perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama anak bangsa, apa pun perbedaannya sehingga tetap dalam kerangka kesadaran persaudaraan.							
Keterbukaan atas Perbedaan Gus Yahya bercerita, berkat penolakan terhadap politik identitas itu, NU dapat menerapkan keterbukaan atas perbedaan-perbedaan. Hal ini terlihat saat PBNU menggelar Peringatan Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo pada 7 Februari 2023 lalu.							

Gambar 4. Artikel NU Online 19-02-2023

Menjelang Pemilu 2024, NU Online menampilkan artikel "Ketua MUI Larang Praktik Politik Identitas Jelang Pemilihan Umum 2024" yang diterbitkan pada 24 November 2022. Dalam artikel tersebut, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, melarang praktik politik identitas karena dianggap dapat menciptakan permusuhan akibat memilih pemimpin berdasarkan identitas yang melekat, bukan prestasi. Namun, ambiguitas terlihat ketika NU sebagai organisasi keagamaan tetap terlibat dalam diskursus politik, sehingga sulit memisahkan antara peran keagamaan dan politik praktis. [NU Online+1](#)[NU Online](#)[Jatim+1](#)

Dalam studi dakwah dan politik modern, titik kritis yang sangat penting adalah ambiguitas yang muncul dalam cerita NU Online mengenai politik identitas. Melalui media, NU sering mengedepankan prinsip-prinsip moderasi, toleransi, dan nasionalisme, tetapi dalam praktiknya, tampak bahwa identitas ke-NU-an diposisikan sebagai inti dari kebenaran keagamaan. Hal ini terkait erat dengan politik identitas karena identitas kelompok, terutama kelompok keagamaan dan organisasi, digunakan sebagai alat utama untuk membentuk dukungan dan kekuatan politik. Dalam situasi seperti ini, dakwah tidak hanya menyebarkan prinsip-prinsip Islam secara keseluruhan, tetapi juga membentuk jarak simbolik antara "kami", yang diwakili oleh *National Union of Muslims* sebagai representasi nasionalis dan moderat Islam, dan "mereka", yang merupakan kelompok lain yang dianggap radikal atau tidak sejalan. Akibatnya, untuk melindungi keutuhan dan identitas bangsa, wacana moderasi justru memperkuat polarisasi sosial dan ideologis.

Sebagaimana dinyatakan oleh PBNU, sikap resmi NU adalah menolak penggunaan identitas keagamaan, termasuk identitas NU atau Islam, sebagai alat politik. NU menentang keras penggunaan agama atau nama organisasi untuk meraih kekuasaan, terutama dengan cara yang memecah belah masyarakat atau bangsa. Pernyataan seperti "Pilih calon ini karena dia Islam, karena dia warga NU. Kalau tidak, maka kamu bukan bagian dari kami" adalah beberapa contoh praktik politik identitas yang ditolak oleh Nahdlatul Ulama. Hal ini disebabkan oleh fakta

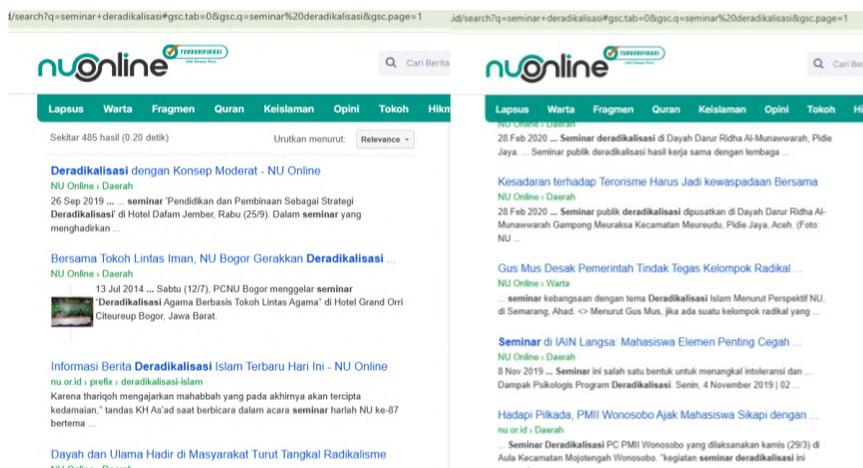
bahwa mereka bertentangan dengan prinsip persatuan, etika dakwah, dan prinsip demokrasi yang inklusif. Sudut pandang ini menunjukkan bahwa Organisasi Keagamaan Nasional berkomitmen untuk menjaga ruang keagamaan tetap netral dari kepentingan politik yang eksploitatif dalam pemilihan.

Sebaliknya, Nahdlatul Ulama secara resmi menolak politik identitas, tetapi terus menunjukkan identitasnya sebagai NU melalui simbol, nilai, dan tradisi dalam berbagai kegiatan sosial dan kebangsaan. Ini terjadi bahkan dalam situasi yang dekat dengan agenda politik, seperti seminar besar, pernyataan publik para tokoh, dan keterlibatan dalam proses pemilu. Tokoh-tokoh NU juga aktif dalam politik nasional, baik sebagai menteri maupun pendukung calon tertentu, tetapi mereka tidak selalu berpartisipasi secara resmi atas nama organisasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa identitas NU masih digunakan sebagai sumber simbolik di ruang publik. Ini menunjukkan ambiguitas antara penolakan terhadap politik identitas dan penggunaan identitas ke-NU dalam arena politik.

Di sinilah ada ambiguitas yang mencolok: Partai Nasional Islam (NU) secara resmi menolak politik identitas, tetapi tetap mempertahankan dan menonjolkan identitasnya, termasuk dalam konteks politik. Ini menimbulkan pertanyaan kritis di kalangan masyarakat umum dan pengamat, seperti "Apa bedanya mempertahankan identitas ke-NU-an dengan menggunakan identitas itu untuk kepentingan politik?" atau "Kapan identitas NU digunakan murni untuk dakwah dan sosial, dan kapan ia mulai menjadi alat politik?" Ada ambiguitas dalam posisi NU terhadap politik identitas karena konflik antara komitmen normatif terhadap netralitas politik dan praktik simbolik yang sarat identitas.

3. Ambiguitas dalam Upaya Deradikalisasi

Nahdlatul Ulama (NU) memainkan peran penting dalam memerangi radikalisme melalui pendekatan dakwah moderat yang disebarluaskan secara aktif di dunia maya, khususnya melalui portal NU Online. Artikel-artikel yang diterbitkan oleh NU Online secara konsisten menunjukkan komitmen NU dalam menangkal paham radikal dan ekstrim serta membangun wacana Islam yang inklusif, toleran, dan cinta tanah air. Upaya ini adalah bagian dari pendekatan keagamaan untuk mengurangi kemungkinan kekerasan atas nama agama. Sebaliknya, ambiguitas muncul ketika cerita tentang deradikalisasi ini secara tidak langsung menggambarkan beberapa kelompok sebagai ekstremis atau radikal. Meskipun berusaha untuk mempertahankan stabilitas sosial, representasi seperti ini dapat menyebabkan stigma dan polarisasi dalam masyarakat. Untuk lebih memahami dinamika ini, penulis akan menampilkan beberapa artikel dari NU Online yang menunjukkan rencana deradikalisasi NU dan menunjukkan kemungkinan ambiguitas dalam cerita yang dibuat.



Gambar 5. Artikel NU Online tentang Deradikalisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) akan secara konsisten mengembangkan berbagai strategi untuk deradikalisasi hingga April 2025, menggunakan platform NU Online dan aktivitas dengan lembaga afiliasinya. Sebagai contoh, Universitas Islam Malang (Unisma) akan menyelenggarakan Seminar Internasional "Islam, Nahdlatul Ulama, dan Deradikalisasi Agama" pada (NU Online 2023d) dengan tujuan meningkatkan pemahaman dunia tentang peran NU dalam memerangi radikalisme. Di tingkat lokal, Lembaga Kajian dan Riset (LKR) PC GP Ansor Tulungagung memulai berbagai kegiatan, termasuk pembedahan buku "Radikalisme Islam dan Deradikalisasi di Sekolah" (NU Online 2023a) dan "Media Online Radikal dan Matinya Rasionalitas Komunikatif" (NU Online 2023b), yang secara kritis mempelajari penyebaran paham radikal di dunia pendidikan dan media online. Pada saat yang sama, Ketua Umum Pagar Nusa, M. Nabil Haroen, menekankan betapa pentingnya melakukan penilaian menyeluruh terhadap program deradikalisasi, terutama setelah peristiwa kekerasan seperti bom di Astanaanyar (NU Online 2022b). Selanjutnya, Agus Muhammad, peneliti senior P3M, mencatat pada 24 Oktober 2019 lima pilar utama dalam strategi NU untuk menangkal radikalisme: penguatan narasi Islam Nusantara dan kaderisasi melalui program PKP-NU dan MKNU (NU Online 2019). Data ini menunjukkan bahwa NU secara strategis menanggapi radikalisme melalui pendidikan, intelektual, dan penguatan kapasitas kader.

Meskipun NU Online berusaha menangkal radikalisme melalui narasi Islam moderat, pendekatan mereka masih ambigu. Tanpa memberikan penjelasan objektif atau kesempatan untuk diskusi yang adil, beberapa artikel menyebut kelompok tertentu sebagai "radikal" atau "ekstrem". Akibatnya, stigma dan stereotip muncul. Selain itu, deradikalisasi yang dipromosikan seringkali identik dengan Islam Nusantara, versi NU, sehingga terkesan eksklusif dan kurang mengizinkan perspektif Islam moderat lainnya. Karena itu, cerita tentang deradikalisasi ini, meskipun bertujuan untuk menjadi inklusif dan damai, malah

menciptakan batas antara "versi moderat dari NU" dan "versi yang dianggap radikal", yang berpotensi meningkatkan polarisasi di masyarakat.

Tiga tema utama narasi yang mendominasi konten dakwah digital terkait populisme agama adalah moderasi dan nasionalisme, politik identitas, dan deradikalisasi, menurut hasil analisis yang dilakukan terhadap artikel di NU Online. Berikut ini adalah tabel ringkasan hasil penelitian untuk memudahkan pemahaman, yang mencakup tema utama, contoh artikel yang dianalisis, narasi utama, dan catatan tentang kemungkinan ambiguitas atau kontradiksi dalam cerita.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian

Tema	Contoh Artikel	Narasi Utama	Catatan Ambiguitas
Moderasi & Nasionalisme	Islam Nusantara Hadir sebagai Jawaban atas Konflik Global	Islam Nusantara sebagai model Islam moderat lokal	Eksklusif terhadap kelompok Islam transnasional
Politik Identitas	PBNU Tolak Politik Identitas demi Persatuan Bangsa	Menolak penggunaan agama sebagai alat politik	Tetap menonjolkan simbol identitas NU
Deradikalisasi	Bahaya Gerakan Islam Transnasional bagi NKRI	NU sebagai benteng utama anti-radikalisme	Menciptakan stigma terhadap kelompok Islam lain

Pembahasan

Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana ambiguitas dalam konten dakwah digital NU muncul dan diwakili melalui NU Online dalam konteks populisme dan politik identitas. Ambiguitas muncul dalam dakwah digital NU, karena ada banyak tekanan dan perjuangan ideologis. Pertama, ada tekanan dari luar, yaitu polarisasi sosial dan politik yang meningkat, terutama menjelang momentum politik besar seperti pemilu, yang memaksa NU untuk mempertahankan identitas moderatnya agar tidak kehilangan pengaruh di masyarakat. Kedua, tekanan internal yaitu tuntutan untuk mempertahankan kesetiaan warga Nahdliyin yang beragam secara keagamaan dan politik, menyebabkan narasi dakwah harus dapat merangkul semua pihak. Ketiga, sebagai tanggapan terhadap tantangan pragmatis yang ada di era komputer dan internet saat ini, Nahdlatul Ulama harus memanfaatkan media online sebagai media utama untuk dakwah dan sekaligus sebagai tempat untuk mempertahankan relevansi. Ketiganya menyebabkan dakwah digital NU menjadi ambigu. Ini dapat mengadvokasi nilai moderasi dan toleransi universal, tetapi juga dapat menegaskan identitas eksklusif untuk keuntungan strategis. Kondisi ini menunjukkan bahwa ambiguitas bukan hanya kontradiksi ideologis; itu adalah strategi adaptasi untuk menghadapi dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks.

Berdasarkan hasil analisis terdapat tiga jenis ambiguitas utama ditemukan pada artikel-artikel NU Online dari tahun 2022 hingga 2024: (1) ambiguitas dalam narasi moderasi dan nasionalisme; (2) ambiguitas dalam penolakan politik identitas; dan (3) ambiguitas dalam wacana deradikalisasi. Ketiganya

menunjukkan pola representasi yang kompleks dan tidak selalu konsisten antara keterlibatan dalam ranah politik simbolik dan wacana normatif dakwah. Berikut analisis wacana kritis Van Dijk penulis uraikan.

1. Ambiguitas Narasi Moderasi dan Nasionalisme

Menurut Teun A. van Dijk, ada tiga tingkat struktur yang membentuk pembacaan wacana dalam Analisis Wacana Kritis (AWK). Struktur makro mencakup tema besar dan makna umum teks, struktur super adalah cara teks disusun dan diorganisasi, dan struktur mikro mencakup pilihan bahasa, kalimat, gaya, dan retorika. Analisis ini diterapkan terhadap hasil ambiguitas narasi moderasi dan nasionalisme dalam wacana yang dibangun oleh NU Online sebagai berikut:

Pada tingkat struktur makro, wacana tersebut menampilkan tema utama yang konsisten, yakni identitas Islam moderat (Islam Nusantara), nasionalisme, dan toleransi. NU diposisikan sebagai pelindung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman ekstremisme serta gerakan transnasional. Hal ini mengindikasikan bahwa NU tidak hanya berperan sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga ideologi kebangsaan.

Selanjutnya, pada tingkat struktur super, teks-teks disusun dengan pola dikotomis antara dua kutub: pihak yang digambarkan sebagai "kami yang baik", yaitu NU yang menjaga keutuhan NKRI, dan "mereka yang mengancam", yaitu kelompok ekstrem atau transnasional. Pola ini terlihat jelas dalam berbagai bentuk tulisan seperti opini, berita, maupun laporan, yang secara sistematis diarahkan untuk memperkuat citra NU sebagai benteng pertahanan negara. Masalah toleransi pun seringkali dikaitkan langsung dengan ancaman dari luar, menegaskan peran NU dalam menghadapi tantangan tersebut.

Adapun pada tingkat struktur mikro, analisis mencakup aspek pilihan kata, gaya retorik, dan penggunaan kutipan otoritatif. Dalam hal pilihan kata, istilah-istilah seperti toleran, moderat, wasathiyah, dan rahmatan lil alamin kerap digunakan untuk mendeskripsikan NU. Sebaliknya, kelompok ideologis yang berseberangan diberi label radikal, intoleran, atau transnasional. Gaya retorik yang digunakan menegaskan adanya dikotomi moral, dengan penggunaan diksi yang merendahkan pihak luar dan memberi stigma terhadap kelompok lain. Sementara itu, kutipan otoritatif dari tokoh-tokoh NU seperti kiai atau pimpinan PBNU sering dimunculkan untuk memperkuat narasi, sekaligus merepresentasikan struktur kuasa yang berada di balik produksi wacana tersebut.

NU Online secara tegas mengusung narasi Islam moderat berbasis lokalitas (Islam Nusantara), toleransi, dan nasionalisme. Stuart Hall (1997) menyatakan bahwa representasi media tidak netral, tetapi membingkai makna sosial tertentu. Dalam hal ini, narasi moderasi NU bukan sekadar ajakan universal; itu menjadi identitas unik yang menegaskan perbedaan antara "kami" (Islam Nusantara) dan "mereka" (Islam transnasional).

Teori populisme agama (Mudde dan Kaltwasser 2017) menyatakan bahwa simbol keagamaan digunakan untuk menimbulkan antagonisme antara individu dan kelompok lain yang dianggap berbahaya. Penemuan ini sejalan dengan teori

ini. Dalam artikelnya tentang bahaya Islam transnasional, NU Online menggambarkan kelompok lain secara negatif, meskipun pada saat yang sama mempertahankan prinsip yang mengintegrasikan. Ini menunjukkan bahwa dakwah moderasi NU memiliki strategi ideologis untuk mempertahankan dominasi epistemologis di ruang keagamaan digital.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dibuat oleh (Solahudin and Fakhruroji 2020), yang menunjukkan bahwa dakwah digital di media sosial membingkai identitas keagamaan dengan narasi yang mungkin eksklusif atau populis. Ini mendukung ide bahwa media dakwah penuh dengan ideologi dan tujuan simbolik.

2. Ambiguitas dalam Penolakan Politik Identitas

Analisis wacana kritis Van Dijk terhadap narasi ambiguitas dalam penolakan politik identitas sebagai berikut :

Pada tingkat struktur makro, tema utama yang diangkat adalah penolakan terhadap politik identitas. Muslim United Nations secara eksplisit menyatakan keberatan terhadap penggunaan agama untuk kepentingan politik. Namun, di sisi lain, identitas ke-NU-an tetap diperkuat dan ditampilkan secara konsisten di ruang publik. Hal ini menimbulkan ambiguitas, karena di satu sisi terdapat klaim netralitas politik, tetapi di sisi lain ada pengakuan terhadap identitas kelompok tertentu yang terus dimunculkan.

Dalam struktur super, tampak adanya pemisahan antara dua gagasan utama: menjaga identitas dan menggunakan identitas secara politis. Walaupun secara wacana ditekankan bahwa NU menolak eksploitasi identitas dalam ranah politik, kenyataannya simbol-simbol dan representasi NU mendominasi berbagai pemberitaan terkait aktivitas politik nasional, seperti pemilu atau seminar politik. Dominasi tersebut menciptakan kontradiksi yang bersifat implisit, karena antara narasi dan praktik terdapat ketidaksesuaian.

Pada tingkat struktur mikro, terdapat beberapa elemen penting yang menguatkan wacana. Dari segi pilihan kata, digunakan istilah-istilah seperti menjaga persatuan bangsa dan menolak politik identitas. Namun, istilah-istilah ini tetap diiringi dengan penyebutan simbol khas NU seperti Aswaja, Nahdliyin, dan Islam Nusantara, yang menguatkan kesan pengarusutamaan identitas kelompok. Dari sisi metode narasi, pernyataan normatif semacam "NU tetap netral secara politik" sering diikuti oleh informasi yang menunjukkan peran signifikan NU dalam politik nasional. Sementara itu, dalam hal penonjolan aktor, tokoh-tokoh sentral NU seperti Ketua PBNU dan Rais Aam kerap dimunculkan sebagai figur yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik, memperlihatkan adanya struktur kuasa yang dibangun melalui narasi tersebut.

Secara normatif, Nahdlatul Ulama menolak politik identitas. Namun, mereka terus memperkuat identitas mereka dalam wacana publik, termasuk menjelang Pemilu 2024. Ambisi ini terlihat jelas dalam pernyataan resmi yang menolak penggunaan simbol agama untuk tujuan politik. Di sisi lain, NU tetap hadir secara simbolik dan institusional di ruang politik.

Teori politik identitas yang ditulis oleh Roy (2004) meningkatkan pemahaman tentang fenomena ini. Agama telah berkembang menjadi penanda identitas

sosial-politik di era globalisasi, dan bukan lagi sekadar sistem spiritual. Identitas NU membentuk kontinuitas di tengah penolakan formal terhadap politisasi identitas melalui simbol, karakter, dan cerita digitalnya. Dengan kata lain, ada perbedaan antara memelihara identitas simbolik secara implisit dan menolak politisasi identitas secara eksplisit.

Penemuan ini mendukung gagasan bahwa orang-orang keagamaan dapat memainkan dua peran. Mereka dapat mengadvokasi nilai-nilai universal dan melindungi identitas tertentu (Asad, 2003). Bahkan, pendekatan ini menunjukkan jenis politik simbolik yang lebih halus dan kultural yang berbeda dari pilihan raya semata.

3. Ambiguitas dalam Wacana Deradikalisasi

Analisis wacana kritis Van Dijk dalam narasi ambiguitas dalam wacana deradikalisasi adalah sebagai berikut:

Pada tingkat struktur makro, tema utama yang diangkat adalah peran strategis NU dalam proses deradikalisasi di Indonesia. Melalui program-program seperti Islam Nusantara, pendidikan kader, dan penyebaran kontra-narasi terhadap paham radikal, NU diposisikan sebagai aktor kunci dalam menjaga stabilitas ideologi keagamaan. Namun, dalam narasi yang dibangun, tampak kecenderungan bahwa NU menjadi satu-satunya pemegang definisi atas konsep moderasi Islam. Akibatnya, ruang untuk munculnya alternatif pemikiran atau pendekatan moderat lainnya menjadi terbatas dan kurang diakomodasi dalam wacana publik.

Pada struktur super, artikel-artikel dirancang untuk menonjolkan keberhasilan NU dalam upaya deradikalisasi. Representasi kelompok-kelompok lain seperti salafi atau wahabi nyaris tidak mendapat ruang untuk menyampaikan perspektif mereka, baik sebagai respons maupun bentuk klarifikasi. Arah diskusi dalam teks-teks tersebut cenderung satu sisi dan menguatkan dominasi NU sebagai otoritas tunggal dalam isu ini, yang secara tidak langsung meminggirkan keberagaman pendekatan dalam menangani radikalisme.

Di tingkat struktur mikro, terdapat beberapa elemen linguistik dan retorik yang memperkuat konstruksi wacana. Dari aspek pilihan kata, organisasi atau kelompok selain NU kerap dilabeli dengan istilah seperti ekstrem, radikal, atau digambarkan secara homogen tanpa menunjukkan keragaman pandangan internal. Dalam hal kontekstualisasi kalimat, narasi deradikalisasi secara konsisten dikaitkan dengan Islam Nusantara, yang secara implisit mengesampingkan pendekatan moderat lain yang mungkin eksis. Sementara itu, dari segi retorika, digunakan bahasa yang bersifat alarmis, seperti penyebutan ancaman radikalisme dan potensi kekerasan, untuk mempertegas urgensi dan legitimasi program-program keagamaan nasional yang didominasi oleh aktor-aktor dari NU.

Menurut teori representasi (Hall 1997), proses deradikalisasi bukan hanya tindakan pencegahan tetapi juga pembentukan simbolik dari siapa yang dianggap "moderat" dan siapa yang dianggap "bermasalah". Persepsi ini menempatkan NU

sebagai aktor hegemonik dalam membingkai norma keagamaan yang sah, sekaligus menghilangkan narasi moderasi alternatif yang tidak sesuai dengan Islam Nusantara.

Hasil ini mendukung ide Lim (2017) bahwa media keagamaan digital dapat memperkuat segregasi sosial melalui wacana kultural. Ini menunjukkan secara teoritik bahwa deradikalisasi berbasis cerita dapat berfungsi sebagai arena kontestasi identitas daripada mekanisme keamanan.

Implikasi Teoretis hasil penelitian mendorong penciptaan teori representasi keagamaan di dunia digital. Dakwah digital sekarang lebih dari sekadar menyebarkan nilai; itu sekarang menjadi cara untuk membuat identitas dan kekuatan simbolik. Untuk mempertimbangkan simbolisme agama dalam lingkungan digital-politik yang cair, diperlukan revisi teori representasi (Hall 1997).

Selain itu, penelitian populisme agama harus memasukkan institusi keagamaan moderat seperti National Union of Islamic Nations (NU). Studi ini menunjukkan bahwa institusi arus utama juga dapat memainkan peran populis secara simbolik, bukan melalui pemilihan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan penjelasan tentang dinamika dakwah digital NU, tetapi juga menawarkan cara baru untuk melihat peran media keagamaan sebagai aktor dalam politik identitas dan kontestasi makna keagamaan di era digital.

Simpulan

Analisis Van Dijk menunjukkan bahwa ambiguitas dalam wacana NU Online berasal dari isi (makro), struktur (superstruktur), dan bahasa yang dipilih (mikro). Oleh karena itu, NU Online tidak sekadar menyampaikan informasi dakwah; itu juga menciptakan wacana kekuasaan yang menempatkan NU sebagai pusat kebenaran dan memperkuat batas simbolik antara mereka (radikal, transnasionalis) dan kami (moderat, nasionalis). Selain itu, dakwah digital NU dapat dianggap sebagai praktik keagamaan dan alat ideologis untuk membangun identitas sosial, melawan lawan ideologis, dan mempertahankan posisi hegemonik di arena politik identitas Indonesia.

Studi dan analisa yang telah diuraikan menunjukkan bahwa dakwah digital NU, khususnya melalui platform NU Online, menunjukkan ambiguitas dalam menanggapi tantangan populisme agama dan politik identitas. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis cara pesan dakwah NU dibuat secara digital dalam lanskap wacana keagamaan dan politik modern.

Tiga jenis ambiguitas ditemukan dalam temuan utama. Pertama, cerita moderasi dan nasionalisme yang diusung oleh NU Online secara simbolik menunjukkan bahwa mereka menerima, tetapi secara implisit memperkuat eksklusivitas identitas kelompok tertentu. Kedua, dalam retorika penolakan terhadap politik identitas, NU Online secara tidak langsung mereplikasi praktik identitas politik melalui simbol dan cerita keagamaan tradisionalnya. Ketiga, dalam upaya deradikalisasi, mereka cenderung mendefinisikan Islam moderat

dalam kerangka khas NU sementara menggambarkan orang lain sebagai radikal, yang menunjukkan bias ideologis terselubung.

Temuan ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa dakwah digital bukan sekadar alat untuk menyebarkan pesan keagamaan; itu adalah tempat yang penuh dengan pertarungan simbolik untuk membuat makna. Sebagai aktor dominan dalam wacana Islam moderat, Nahdlatul Ulama memainkan dua peran dalam konteks ini: menjaga nilai-nilai keagamaan yang inklusif dan bertindak sebagai pelaku simbolik dalam arena identitas politik keagamaan. Oleh karena itu, NU Online bukan hanya media dakwah tetapi juga alat kultural yang mempertahankan posisi ideologis NU di dunia digital.

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi media keagamaan sangat penting bagi masyarakat untuk memahami narasi dakwah digital secara kritis, terutama karena ambiguitas yang dapat memperkuat polarisasi sosial. Praktisi dakwah digital disarankan untuk lebih berhati-hati dalam memilih diksi, menyusun narasi, dan menghindari menggunakan simbol keagamaan secara eksklusif yang dapat menyinggung kelompok lain. Selain itu, para pengambil kebijakan di bidang keagamaan harus membuat pedoman untuk dakwah digital yang lebih terbuka dan sensitif terhadap perubahan dalam politik identitas. Ini diperlukan agar dakwah dapat benar-benar memperkuat persatuan nasional dan bukan hanya menjadi alat untuk legitimasi politik.

Referensi

- Asad, T. 2003. *Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity*. California: Stanford University Press.
- Dijk, T. A. Van. 1993. "Principles of Critical Discourse Analysis." *Discourse & Society* Vol. 4 (2): 249-283
- Hall, Stuart. 1997. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: SAGE Publications.
- Kholili, M, Ahmad Izudin, and Muhammad Lutfi Hakim. 2024. "Islamic Proselytizing in Digital Religion in Indonesia: The Challenges of Broadcasting Regulation." *Cogent Social Sciences* 10 (1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2357460>.
- Lim, Merlyna. 2017. "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia." *Critical Asian Studies* 49 (3): 411-27. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>.
- Mudde, Cas, and Cristóbal Rovira Kaltwasser. 2017. *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- NU Online. 2019. "Lima Upaya NU Tangkal Radikalisme Menurut Peneliti P3M." <https://www.nu.or.id/nasional/lima-upaya-nu-tangkal-radikalisme-menurut-peneliti-p3m-jhggf>.
- . 2021. "Peran NU Dalam Menangkal Radikalisme." <https://nu.or.id/opini/peran-nu-dalam-menangkal-radikalisme-51drR>.
- . 2022a. "Islam Nusantara Hadir Sebagai Jawaban Atas Konflik Global." <https://islam.nu.or.id/nasional/islam-nusantara-hadir-sebagai-jawaban-atas-konflik-global-04ypo>.
- . 2022b. "Ketua Umum Pagar Nusa Soroti Evaluasi Program Deradikalisasi

- Pascainsiden Astanaanyar." <https://www.nu.or.id/keamanan/pagar-nusa-evaluasi-program-deradikalisasi-bom-astanaanyar-mnbvc>.
- . 2023a. "Bedah Buku: Radikalisme Islam Dan Deradikalisasi Di Sekolah." <https://www.nu.or.id/daerah/bedah-buku-radikalisme-islam-dan-deradikalisasi-di-sekolah-xyz12>.
- . 2023b. "Media Online Radikal Dan Matinya Rasionalitas Komunikatif." <https://www.nu.or.id/daerah/media-online-radikal-dan-matnya-rasionalitas-komunikatif-qwerty>.
- . 2023c. "PBNU Tegaskan NU Tolak Politik Identitas Sebagai Senjata Galang Dukungan." 2023. <https://jabar.nu.or.id/nasional/pbnu-tegaskan-nu-tolak-politik-identitas-sebagai-senjata-galang-dukungan-q1MbYNU>.
- . 2023d. "Seminar Internasional: Islam, Nahdlatul Ulama, Dan Deradikalisasi Agama." <https://www.nu.or.id/pendidikan/seminar-internasional-islam-nahdlatul-ulama-dan-deradikalisasi-agama-abcde>.
- Roy, O. 2004. *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. New York: Columbia University Press.
- Solahudin, Dindin, and Moch Fakhruroji. 2020. "Internet and Islamic Learning Practices in Indonesia: Social Media, Religious Populism, and Religious Authority." *Religions* 11 (1): 1–12. <https://doi.org/10.3390/rel11010019>.